

2

Radikalisme Islam di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan

Belakangan ini ramai dibicarakan oleh banyak kalangan tentang kebangkitan agama. Kebangkitan agama itu ditandai dengan meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya (*religious dedication*), seperti makin rajinnya pemeluk Kristen dan Katolik datang ke gereja, makin rajinnya orang Islam mengerjakan shalat lima waktu dan puasa dan lain sebagainya.¹ Kebangkitan itu dialami tidak saja oleh satu agama, tetapi semua agama mengalami fenomena yang sama. Di Indonesia misalnya, kebangkitan Islam dapat dilihat dari ramainya kelas menengah dan kelas menengah kota yang berduyun-duyun untuk melaksanakan ajaran agama. Pada saat bulan Ramadhan peningkatan dedikasi terhadap Islam itu begitu terasa, di mana televisi dan hotel serta perkantoran diramaikan dengan suasana suci bulan Ramadhan. Kebangkitan agama menjadi fenomena menarik karena terjadi persis ketika orang berpikir bahwa kekuatan rasional (*rational forces*) dari sains dan teknologi telah berhasil menepikan misteri spiritual (*spiritual mystery*) dari kerangka

¹Menurut Survey PPIM, terjadi proses santrinisasi besar-besaran di Indonesia. Hal itu terlihat dari makin aktifnya Muslim Indonesia melakukan shalat lima waktu (82%) dan menjalankan ibadah puasa (90%). "Makin Saleh Makin Curiga", *Tempo*, 29 Desember 2001.

berpikir manusia modern—dan persis ketika manusia modern menyangka bahwa kecukupan materi dapat memenuhi kebahagiaan manusia. Pada saat itulah justru kebangkitan agama mendapat mommentumnya.

Apakah bahasa yang tepat untuk mengungkapkan fenomena munculnya kembali agama di atas pusat panggung dunia (*centre stage*)? Sebagian menyebutnya sebagai kebangkitan (*revival*), tapi sebagian lainnya menyebutnya sebagai penemuan kembali (*rediscovery*).² *Revivalism* mempunyai konotasi adanya titik balik bersama (*collective turning point*), kembali ke agama. Dengan demikian, gejala maraknya orang melaksanakan kembali ajaran agama adalah pertanda adanya kebangkitan agama. Ataukah itu hanya menemukan kembali agama yang dulu pernah ada dan sekarang ditemukan kembali (*rediscovery*). Pada dasarnya rasa keagamaan manusia modern tidak pernah hilang. Maka ketika mereka kembali pada agama sesungguhnya, mereka hanya menemukan (*discovered*) agamanya kembali.³

Salah satu yang menonjol dari fenomena kebangkitan agama tersebut adalah menguatnya gerakan yang mempunyai karakter fundamentalis yang dialami oleh semua agama dan terjadi hampir di setiap wilayah dunia. Dari gerakan militan Islam di Iran dan Lebanon, gerakan faksi Zionis di Israel, konflik yang menguat antara Protestan dan Katolik di Irlandia Utara, sampai pada perbondong-bondongnya orang menonton 'televangelis' di Amerika Serikat. Semua fenomena di atas menunjukkan terjadi reorientasi yang cukup besar di dalam masyarakat dalam

²Robert Wuthnow, *Rediscovering the Sacred: Perspective on Religion in Contemporary Society*, Michigan: Eerdmans, 1992, hlm. 1-5
³*Ibid.*

mengapresiasi kembali agama, walaupun bentuk mereka berbeda-beda.

Di Indonesia, gejala semakin tumbuhnya komitmen umat Islam untuk menjalankan agamanya secara baik merupakan bagian dari potret global kebangkitan agama. Kebangkitan agama di Indonesia sebagian dapat dijelaskan lewat krisis modernitas. Proses materilisasi kehidupan, terpinggirnnya spiritualitas dan menonjolnya nilai-nilai rasionalitas yang diakibatkan dari berkembangnya sains dan teknologi adalah bagian dari penjelasan kebangkitan agama. Hal itu terlihat dari maraknya pengajian-pengajian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Juga terlihat kelompok pengajian di masjid-masjid kampus yang kian marak.

Runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru memunculkan gerakan-gerakan sosial, politik dan keagamaan baru. Begitu kran kebebasan terbuka, muncul banyak organisasi sebagai wadah bagi penyuaran aspirasi. Munculnya gerakan secara massif itu dimungkinkan karena adanya respon sosial politik yang tertunda (*delayed responses*) terhadap sistem politik yang otoriter Orde Baru.⁴ Tidak mengherankan jika muncul gerakan-gerakan sosial politik yang bertolak belakang dengan gerakan-gerakan mono-ideologi yang terjadi pada masa Orde Baru. Gerakan-gerakan buruh, guru, mahasiswa dan gerakan-gerakan sosial lainnya bermunculan di berbagai kota di Indonesia. Dalam panggung politik muncul pula partai-partai baru, baik yang memakai simbol agama ataupun simbol sosial lainnya, yang turut meramaikan pesta demokrasi di Indonesia. Era reformasi Indonesia juga

⁴Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalisms Observed*, Chicago: The University of Chicago Press, 1991, hlm. 9.

diwarnai adanya kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung simbol-simbol militansi agama yang kental. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kelompok keagamaan baru banyak didominasi oleh kelompok Islam.

Kemunculan kelompok keagamaan Islam baru, seperti gerakan Islam radikal ataupun Islam liberal maupun partai-partai politik Islam turut meramaikan potret politik dan sosial Indonesia mendatang. Ramainya partai Islam yang ikut dalam pemilu tahun 1999 dengan mengusung ideologi politik Islam—seperti menjadikan Islam sebagai asas politik partai, mengimplementasikan syariat Islam di masyarakat, dan mengangkat kembali isu Piagam Jakarta ke dalam UUD 45 terutama pemasukan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.” Tak pelak lagi munculnya isu-isu ideologis yang diusung oleh partai Islam ini mewarnai peta perpolitikan Indonesia saat ini.

Tulisan ini hendak memfokuskan pada munculnya kelompok yang, menurut pengakuan pengikutnya, ingin menjalankan Islam dengan *kāffah*—menyeluruh, konsekuen dan tegas—di Indonesia. Kelompok ini mendapat julukan bermacam-macam mulai sebutan fundamentalisme, ekstrimisme, radikalisme dan militanisme. Tentu saja sebutan-sebutan itu tidak pernah dimunculkan oleh mereka, tetapi sebutan yang diberikan orang lain kepada mereka, sehingga tidak dapat dihindari istilah-istilah tersebut mengandung makna yang pejoratif. Misalnya saja istilah “fundamentalisme” pada mulanya diberikan kepada kelompok Kristen Protestan yang ingin kembali ke fundamen agama mereka secara mendasar. Terkandung di dalam keinginan itu adalah penolakan mereka terhadap rasionalitas yang dianggap telah menyisihkan wahyu (agama) sebagai

justifikasi kebenaran. Akibatnya, kelompok ini menolak kemajuan sains dan teknologi yang berkembang bersama rasionalitas. Ketika istilah fundamental ini dinisbatkan kepada kelompok Islam, tampaknya tidak sesuai dengan karakter yang ada.

Gerakan Militan Islam di Indonesia: Menelusuri Akar Sosio-Historis

Bukan karena kasus Bom di Bali saja yang membuat gerakan militan Islam di Indonesia menarik untuk dikaji, karena adanya tuduhan dari beberapa negara yang mengarahkan kemungkinan pelakunya dari kelompok Islam garis keras. Atau juga bukan karena peristiwa 11 September 2001 ketika dua gedung kembar WTC hancur ditabrak oleh pesawat teroris, sehingga kajian tentang kelompok Islam garis keras banyak dilakukan. Juga bukan karena tesis Samuel P. Huntington yang mengindikasikan akan adanya *Clash of Civilization* yang lain setelah hancurnya kekuatan komunisme Uni Sovyet, gerakan keagamaan garis keras Islam semakin dicermati. Tentu kalau hanya karena itu, kajian-kajian yang mendalam tentang gerakan Islam garis keras baru akan muncul belakangan saja.

Memang harus diakui, ketiga peristiwa tersebut, termasuk peristiwa-peristiwa lainnya, ikut memberikan andil yang besar terhadap maraknya kajian tentang gerakan Islam garis keras di negara-negara Islam. Buku semacam *Islamic Threat: Myth or Reality* yang ditulis oleh John L. Esposito memang ditulis untuk merespon tesis Huntington.⁵ Akan tetapi kajian mengenai gerakan garis keras Islam di Iran, Pakistan, Mesir,

⁵John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York: Oxford University Press, 1992.

Aljazair dan lainnya telah muncul jauh hari sebelum ketiga peristiwa di atas terjadi. Dengan demikian, munculnya gerakan-gerakan keras Islam tidak semuanya lahir akibat konflik atau kebencian sebagian kelompok Islam dengan Barat.

Gerakan garis keras di Iran misalnya, walaupun unsur anti Barat sangat kental di dalamnya, dapat ditelusuri secara historis dari terpinggirnnya kelompok Syi'ah—terutama keturunan Ali—dari *mainstream* politik Islam pada waktu itu. Setelah Mu'awiyah berkuasa keluarga Ali dikejar-kejar dan dianggap sebagai musuh negara. Akibatnya, Syi'ah menjadi kelompok klandestin yang hidup mengembara. Dalam suasana yang termajinalkan dan terkucilkan dari komunitas, ikatan-ikatan kelompoknya tumbuh menjadi sangat solid. Implikasi selanjutnya adalah kepercayaan mereka terhadap pemimpin juga sangat kuat. Tidak mengherankan jika gerakan Syi'ah sangat dipengaruhi oleh semangat messianisme yang berharap akan kedatangan sang penyelamat untuk mereka. Darisini jelas bahwa kelahiran kelompok garis keras di Iran pada mulanya tidak lahir karena anti terhadap Amerika. Memang harus diakui, belakangan semangat anti Amerika begitu kentara. Dalam kasus tergunanya kekuasaan Syah Reza dan naiknya Imam Khomeini jelas terlihat sekali peran sentimen keagamaan.

Di Indonesia, sejarah tentang gerakan Islam garis keras dapat ditemukan jauh sebelum peristiwa-peristiwa di atas. Salah satu gerakan Islam garis keras yang muncul pada masa Indonesia modern adalah gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia).⁶ Gerakan DI/TII ini besar di tiga

⁶Pembahasan yang lengkap tentang DI/TII lihat Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam: the Darul Islam in Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

wilayah, Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan Darul Islam atau Negera Islam Indonesia awalnya hanya di Jawa Barat, dan baru kemudian gerilyawan Aceh dan Makassar ikut bergabung walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Gerakan mereka disatukan oleh keinginan untuk menjadikan syariah sebagai dasar negara Indonesia.

Gerakan DI/TII muncul ketika gerilyawan di bawah pimpinan Kartosuwiryo menolak perjanjian Renville dengan pemerintah Belanda.⁷ Mereka kemudian keluar dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat untuk meneruskan perlawanan mereka terhadap Belanda. Kelompok ini dapat menguasai tiga wilayah di Jawa Barat, yaitu Ciamis, Garut dan Tasikmalaya yang dijadikan basis dari perlawanan mereka. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia yang menyetujui perjanjian Renville tersebut, Kartosuwiryo dan kelompoknya menjadikan syariah sebagai dasar hukum bagi kelompoknya dan menamakan dirinya sebagai Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan Darul Islam ini berhenti ketika semua pimpinan tertangkap atau terbunuh pada awal 1960-an.

Gerakan Islam garis keras muncul kembali pada awal tahun 1970-an dan 1980-an. Kelompok seperti Komando Jihad, Ali Imron, Teror Warman dan semacamnya muncul ke permukaan. Kelompok ini menyatakan perang terhadap komunisme di Indonesia. Oleh karena itu, banyak dugaan bahwa kelompok ini "dimanfaatkan"—kalau tidak buatan—intelejen pemerintah Indonesia saat itu untuk melawan komunisme. Di samping itu, gerakan-gerakan ini dijadikan legitimasi bagi pemerintah untuk melarang dan menindak

⁷*Ibid.*

tegas gerakan Islam garis keras di Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memotong gerakan tersebut dengan partai politik yang menggunakan isu agama dalam kampanyenya. Usaha tersebut tampaknya berhasil dan gerakan Islam garis keras menjadi stigma jelek untuk beberapa waktu.

Ketika masa reformasi, gerakan Islam garis keras juga bermunculan. Gerakan Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia dan lain-lainnya menunjukkan hal itu. Kemunculan mereka, di samping sebagai wujud dari respon psikologis yang tertunda (*delayed psychological response*) terhadap kekuasaan yang otoriter, sesungguhnya adalah fenomena yang biasa ketika pintu keterbukaan dibuka. Gerakan Islam garis keras hanyalah salah satu dari banyaknya gerakan yang muncul pada masa reformasi.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang politik lokal—dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik, dan semacamnya—tampaknya menjadi alasan utama munculnya gerakan Islam garis keras. Agama pada tahap awal bukanlah pemicunya. Namun demikian, ketika kelompok telah terbentuk, agama menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting.

Isu solidaritas terhadap penderitaan umat Islam di belahan bumi lain juga faktor yang penting dalam menumbuhkan sikap radikalisme. Isu Palestina-Israel adalah salah satu faktor yang sangat penting yang disuarakan oleh kelompok Islam. Sentimen ketidakadilan atas sikap dunia Barat terhadap perilaku dan tindakan Israel terhadap Palestina tidak seimbang dengan sikap dan tanggapan yang keras kepada Irak. Tidak mengherankan jika masalah Palestina merupakan

salah satu faktor solidaritas yang dapat menimbulkan sikap radikal.

Terkait dengan isu solidaritas internasional umat, peristiwa revolusi Iran juga merupakan inspirasi bagi gerakan kelompok Islam garis keras. Munculnya Imam Khomeini dalam revolusi Islam Iran dinilai oleh umat Islam sebagai lambang perlawanan kaum Muslim tertindas untuk melawan penindasnya. Maka pengaruh itu jelas sekali terlihat dalam perilaku kelompok garis keras seperti dalam berpakaian maupun dalam menyuarakan aspirasi-aspirasinya.

Namun demikian, terlepas dari faktor internal di atas, gerakan Islam garis keras, dari sudut teologis, diinspirasi oleh pemahaman agama yang cenderung tekstual—memahami agama secara apa adanya yang tertulis dalam teks-teks suci agama. Pemahaman tekstual ini mengabaikan faktor konteks sosial—sejarah, sosial dan politik serta rasional yang melatarbelakangi lahirnya sebuah doktrin atau keputusan agama—yang menjadi *raison de être* dari sebuah doktrin agama. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan yang skripturalis. Pendekatan skripturalis juga mereka gunakan untuk melihat realitas sejarah umat Islam. Misalnya saja, melihat zaman keemasan Islam (*the golden age*) pada masa silam sebagai sebuah "teks" yang harus diwujudkan secara "apa adanya" sekarang ini.

Profil Gerakan Militan Kontemporer Indonesia

Beberapa kelompok dapat dikategorikan sebagai kelompok militan Islam di Indonesia. Di antara kelompok itu ada yang lahir berbarengan dengan peristiwa politik nasional, sedangkan yang lain merupakan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut konflik antara umat Islam dan

Kristen yang terjadi di beberapa daerah. Masing-masing organisasi mempunyai latar belakang dan *raison de être* sendiri yang pasti mempunyai perbedaan dan kesamaan.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dideklarasikan pada bulan Agustus 2000 di Yogyakarta yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Deklarasi MMI juga dihadiri oleh wakil dari umat Islam di luar negeri. Terpilih sebagai Amir MMI adalah Abu Bakar Ba'asyir, salah seorang pendiri Pesantren Ngruki Surakarta. Kemunculan Abu Bakar Ba'asyir sangat menarik. Hal itu dikarenakan kaitan Abu Bakar Ba'asyir dengan gerakan Komando Jihad yang dilakukan bersama dengan Abdullah Sungkar yang juga sama-sama pendiri Pesantren Ngruki. Abu Bakar Ba'asyir kemudian melarikan diri ke Malaysia menghindari kejaran pemerintah Orde Baru. Abu Bakar Ba'asyir kembali ke Indonesia ketika rezim Orde Baru jatuh, dan menggantikan pemerintahan baru.

MMI mempunyai agenda utama, yaitu penegakan syariat Islam.⁸ Agenda pendirian MMI ini erat kaitannya dengan keinginan sebagian umat Islam untuk mendirikan Negara Islam (*Daulah Islamiyah*). Oleh karena itu MMI menganggap dirinya sebagai kelanjutan dari DI/TII yang beberapa dekade yang lalu ingin mendirikan negara Islam.⁹ Sebagian besar faksi yang bergabung dalam MMI ini berasal dari kaum

pergerakan Darul Islam (DI) dari beberapa daerah, yang ingin kembali mencoba membangun kekuatan mereka yang tercerai berai.

Tidak seperti gerakan garis keras lainnya seperti FPI dan Laskar Jihad yang berjuang secara keras, MMI memilih jalur yang lebih politis. Misalnya anggota MMI memilih untuk melakukan advokasi penerapan syariat Islam di Indonesia dengan membangun wacana publik lewat tulisan-tulisan, baik media massa maupun di internet ataupun penerbitan buku. Mereka juga aktif melakukan lobi-lobi politik kepada partai-partai Islam untuk memperjuangkan Piagam Jakarta lewat sidang-sidang resmi parlemen. Sebagai ajang sosialisasi, MMI juga aktif melakukan seminar-seminar, baik di lingkungan kampus ataupun masjid-masjid tentang pelaksanaan syariat di Indonesia.

Dengan sikap yang lebih politis dan sekaligus akademis, MMI seringkali berbeda pendapat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPI maupun Laskar Jihad. Walaupun secara ide mereka bertemu, tetapi dalam penerapannya mereka mempunyai jalur yang berbeda.

MMI pada mulanya ingin dijadikan sebagai kelompok koalisi, atau kelompok aliansi, bagi kelompok-kelompok serupa yang ingin memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Keinginan itu terlihat dari kedatangan dari berbagai utusan dalam kongres pertama MMI di Yogyakarta tahun 2000 yang sekaligus menjadi tonggak pendirian MMI. MMI diharapkan dapat menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam bagi seluruh umat Islam dari berbagai suku dan golongan tanpa dibatasi wilayah geografis atau negara. MMI merumuskan tiga formulasi, yakni kebersamaan dalam misi penegakan syariat Islam (*tansîqul fardî*), kebersamaan dalam program penegakan

⁸Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariat Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.

⁹Jajang Jahroni, "Islamic Contemporary Movement in Indonesia," *Refleksi*, UIN Jakarta, 2001.

syariah Islam (*tansiqul 'amali*), dan kebersamaan dalam satu institusi penegakan syariah Islam (*tansiqun nidhami*).¹⁰

Para pendukung MMI menyadari bahwa perjuangan untuk menerapkan syariah Islam di Indonesia terkumpul dalam berbagai kelompok yang berbeda. Maka MMI, sebagai kelompok koalisi dimaksudkan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum Muslimin, agar perjuangan penerapan syariah Islam (*tathbiq al-syari'ah*) secara komprehensif (*kâffah*) dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pemerintahan, baik secara nasional maupun internasional dapat dimaksimalkan.¹¹

Belakangan MMI ramai dibicarakan ketika tokoh pemimpinnya Amirul Mujahidin Abu Bakar Ba'asyir ditangkap oleh pihak keamanan karena dituduh telah bersekongkol akan membunuh Presiden Megawati maupun pengeboman di sejumlah tempat umum, seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan perkantoran. MMI juga dianggap sebagai kepanjangan dari organisasi Jama'ah Islamiyah Asia Tenggara yang ingin menghancurkan fasilitas-fasilitas milik Barat dan Amerika yang ada di Asia Tenggara.

Front Pembela Islam (FPI)

FPI lahir bersamaan dengan naiknya Habibie menjadi presiden setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Karena Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, maka mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut pergantian kepemimpinan yang baru. Tuntutan itu semakin

besar hingga pada saat Sidang Istimewa MPR RI, mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran.

FPI lahir di Jakarta sebagai gerakan tekanan (*pressure group*) yang bertujuan untuk memberantas kemaksiatan, seperti pelacuran, rumah hiburan malam dan sebagainya. Dipimpin oleh seorang da'i muda, Habib Muhammad Rizieq Syihab, FPI menjadi perhatian publik karena tak segan-segan dalam aksi-aksinya, mereka menggunakan kekerasan.

Meskipun menolak kepemimpinan Megawati atas dasar jenis kelamin, FPI tidak larut dalam isu-isu politik seperti itu. Aksi yang dilakukan FPI sehari setelah terpilihnya Megawati menjadi presiden kelima dalam SI tahun 2001 tidak ditindaklanjuti dalam eskalasi yang lebih besar. FPI justru sibuk dengan penggalangan aksi-aksi penertiban kafe-kafe dan lokalisasi maksiat. Pada wilayah perdebatan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia, FPI juga turut aktif menggalang massa untuk mendukung pengembalian Piagam Jakarta. Pilihan isu dan penetapan skala prioritas agenda dan sasaran aksi ini membuat FPI memiliki *area of concern* tersendiri yang membedakannya dengan kelompok Islam garis keras lainnya seperti Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Majelis Mujahidin dan lain-lain.

FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998. Bertempat di Pesantren al-Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, FPI dideklarasikan. Deklarasi FPI sendiri diramaikan dengan tabligh akbar dan disesuaikan juga dengan milad Pesantren al-Umm. Gagasan berdirinya FPI berawal dari perbincangan antara Habib Muhammad Rizieq Syihab (ditulis Habib Rizieq) dengan Misbahul Anam yang kemudian menjadi para pendiri FPI. Mereka prihatin dengan melonjaknya grafik kemaksiatan dan kemungkaran di

¹⁰Markaz, Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin*, Yogyakarta: tt, hlm. 16.

¹¹*Ibid.*, hlm. 15.

tengah masyarakat. Untuk itu, mereka berdua mengajak ulama dan habib lainnya, seperti K.H. Cecep Busthomi (meninggal ditembak), K.H. Damanhuri dan Habib Idrus Jamalullail untuk terlibat di dalamnya.¹²

Menurut Habib, maksud dan tujuan perjuangan FPI, sebagai organisasi Islam yang berasaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah (berorientasi *manhaj salafi*) adalah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Penyebutan kata "Pembela Islam" di sini, menurut Habib Rizieq, juga ada maksudnya. Bahwa yang dibela oleh FPI bukan umat Islamnya saja, tapi nilai-nilai keislaman yang boleh jadi dilaksanakan oleh umat non-Muslim. Motto perjuangan FPI yang selalu diangkat adalah "Hidup Mulia atau Mati Syahid."

Komitmen FPI pada awal mulanya memang untuk menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi kalau misalnya, Habib Rizieq menulis buku yang berjudul *Dialog Piagam Jakarta* sekaligus bersama-sama aktivis FPI mendukung pengembalian Piagam Jakarta.¹³ Tujuan menerapkan syariat Islam ini disosialisasikan melalui badan khusus bernama Komite Penegakan Syariat Islam yang terjun aktif sampai ke daerah-daerah. Dalam jenjang dua tahun lebih saja, menurut pengakuan K.H. Misbahul Anam, FPI sudah memiliki anggota sebanyak 15 juta jiwa yang tersebar di 18 provinsi.¹⁴

¹²PBB dan Pemda DKI Jakarta, "Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta," Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Jakarta, hlm. 22. Keterangan ini berdasarkan wawancara dengan K.H. Misbahul Anam, mantan sekretaris dan pendiri FPI.

¹³Habib Rizieq Syihab, *Dialog Piagam Jakarta: Kumpulan Jawaban Sepertar Keraguan Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: PIS, 2000.

¹⁴PBB dan Pemda DKI Jakarta, *Radikalisme Agama*, hlm. 23.

Penerapan syariat Islam yang didukung FPI bukan berarti mengganti dasar dan bentuk negara. FPI menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Yang dipersoalkan FPI adalah adanya hukum positif bagi umat Islam yang disesuaikan dengan syariat Islam yang sudah baku sebagaimana disebut oleh Alquran dan Hadis.

Basis gerakan dari FPI adalah masyarakat pinggiran kota, seperti Ciputat, Bekasi dan sebagainya atau daerah-daerah *slum* kota (daerah kumuh di kota). FPI mempunyai garis komando yang sistematis sampai ke tingkat desa. Setiap kali melakukan aktivitas, seperti demonstrasi dan aksi "perlakuan terhadap maksiat" FPI dengan cepat dapat mengumpulkan massanya. Hal itu mungkin disebabkan pengaruh jaringan Habib (keturunan nabi dari Hadramaut) yang memang sangat dihormati oleh masyarakat Betawi.

Setelah aparat keamanan Indonesia bertindak tegas atas aktivitas FPI yang merusak bar dan diskotik, para elit pimpinan FPI membekukan sementara FPI. Beberapa pimpinan FPI, termasuk ketua umumnya, Habib Rizieq ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan pengrusakan.

Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKAWJ)

Membicarakan tentang Laskar Jihad Ahlussunnah Wal-Jama'ah tidak bisa dilepaskan dari Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ). Begitu pula membicarakan FKAWJ tidak bisa lepas membicarakan tokoh penting dalam organisasi itu, yaitu Ja'far Umar Thalib. Hal itu karena FKAWJ didirikan atas kerja keras Ja'far sendiri. FKAWJ dideklarasikan lewat sebuah pengajian akbar di Yogyakarta pada 14 Februari 1999. Meskipun demikian, FKAWJ tidak lepas dari

jasa M. Umar As Sewed, Ayip Syafruddin dan Ma'ruf Bahrun.

Genealogi FKAWJ sangat erat terkait dengan Jamaah al-Turats al-Islami di Yogyakarta, suatu gerakan yang didirikan oleh Ja'far dan Abu Nida (Chamsaha Sofwan). Kelompok ini merupakan gerakan "semi klandestine" karena mereka lebih memilih mengadakan pertemuan mereka secara rahasia. Tidak mengherankan jika kemudian kelompok ini diasosiasikan dengan gerakan semacam Ikhwani Muslimin dan DI/TII.¹⁵ Pesantren Ihya'u as-Sunnah pimpinan Ja'far Umar Thalib di Yogyakarta menjadi basis gerakan FKAWJ. Berdasarkan tujuan untuk memberikan fasilitas kembalinya "kehormatan" umat Islam Indonesia yang sempat terkubur pada rezim otoriter Orde Baru, FKAWJ mulai aktif melakukan aktivitasnya.¹⁶

Kelahiran FKAWJ dimotivasi oleh krisis ekonomi, politik dan sosial-keagamaan yang melanda Indonesia sejak bergulirnya reformasi. Maka dalam sebuah pengajian Akbar di Yogyakarta, FKAWJ ikut bergabung dengan kelompok Islam lainnya yang mendukung Habibie. Bagi FKAWJ perlawanan sebagian mahasiswa dan massa terhadap kepemimpinan Habibie adalah bentuk ketidaksenangan mereka terhadap kepemimpinan orang Islam. FKAWJ dengan *wing* militernya, Laskar Jihad, ikut bergabung dengan Forum Umat Islam yang mendukung pemerintahan Habibie waktu itu.

Selain itu, Laskar Jihad menjadi pusat perhatian kira-kira awal tahun 2000 ketika Laskar Jihad menyuarakan jihad ke Ambon untuk membantu umat Islam melawan Kristen di

¹⁵*Ibid.*, hlm. 39-40.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 37-38.

Maluku. Mereka berdalih bahwa jihad perlu dilakukan karena kelompok RMS ada di belakang konflik keagamaan di Ambon. Kelompok RMS ingin melepaskan Ambon dari pangkuan ibu pertiwi Indonesia. Menurut Laskar Jihad, kedatangan mereka adalah untuk mempertahankan merah putih.

Namun demikian, kedatangan Laskar Jihad di Ambon justru mempertegas konflik agama di sana. Dengan adanya Laskar Jihad yang terang-terang membawa bendera Islam, muncullah kelompok serupa di kelompok Kristen dan Katolik seperti Laskar Kristus. Tak pelak lagi setelah itu konflik dapat dikatakan konflik agama.

Laskar Jihad juga ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Ketika mereka berjihad di Ambon, hukum syariat diterapkan untuk anggotanya. Misalnya ketika ada salah satu anggota Laskar Jihad yang melakukan zina, ia dihukum rajam seperti apa yang diamankan oleh syariat Islam. Kontan saja pemberlakuan syariat tersebut mendapat reaksi yang cukup keras. Namun demikian, Laskar Jihad mengklaim dirinya tidak ikut dalam memperjuangkan negosiasi Negara Islam di Indonesia, seperti yang disuarakan oleh kelompok garis keras lainnya. Melainkan Laskar Jihad lebih memfokuskan dirinya untuk memperbaiki kualitas keislaman individu Muslim.

Di samping jihad, Laskar Jihad juga mengembangkan pesantren yang pada awalnya, menurut pengakuan Laskar Jihad, untuk menampung anak-anak yatim dan piatu dari Ambon. Sebuah pesantren di desa Mungkid Magelang misalnya, santri-santrinya mayoritas terdiri dari anak-anak Ambon. Di samping itu, pesantren Laskar Jihad juga dimaksudkan sebagai tempat para mahasiswa yang ingin

memperdalam ilmu agama, sekaligus mereka mengajarkan anak-anak pengungsi Ambon tentang baca dan tulis.

Belakangan Laskar Jihad membubarkan diri setelah mendapat fatwa dari Imam mereka yang berada di Madinah. Pembubaran Laskar Jihad mengundang banyak tanda tanya. Hal itu karena pembubaran tersebut ketika kasus pengemboman Bali sedang hangat. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa pembubaran mereka terkait dengan peristiwa pengemboman Bali. Namun hal itu ditolak oleh Ja'far Umar Thalib yang menyatakan bahwa pembubaran Laskar Jihad murni karena fatwa imam mereka di Madinah. Imam mereka melihat bahwa Laskar Jihad telah disalahgunakan oleh oknum anggotanya. Maka untuk menghindari kejelekan yang lebih parah, Laskar Jihad dibubarkan. Kemudian Imam Laskar Jihad mereka juga melihat bahwa tugas mereka di Ambon telah selesai. Karena *raison de 'etre* mereka Jihad di Ambon, maka ketika tugas di Ambon selesai Laskar Jihad harus dibubarkan.

Tiga kelompok ini hanyalah sebagian dari beberapa gerakan-gerakan Islam garis keras lainnya, seperti Darul Islam, Hizbut Tahrir, Tarbiyah Islamiyah, Ikhwatul Muslimin dan lain sebagainya. Walaupun jelas terlihat kesamaannya, misalnya dalam masalah penerapan syariat Islam di Indonesia, masing-masing mempunyai agenda kelompok tersendiri yang terkadang menjadi pembeda yang sangat tajam. Adanya agenda kelompok tersebut, yang mungkin sangat terkait dengan kepentingan politik (*political interest*), membuat kelompok-kelompok tersebut sering melakukan kerja sama dengan kelompok lain yang mempunyai kepentingan serupa. Namun demikian, sebesar kesamaan mereka, sebesar itu pula perbedaan yang membuat mereka tidak dapat bergabung dalam sebuah kelompok.

Gerakan Islam Militan Kontemporer: Bangkitnya Islam Politik?

Pada suatu petang menjelang malam, terlihat sekelompok orang dengan pakaian serba putih, berlengan panjang dan celana panjang putih selutut seperti pakaian orang-orang Arab Timur Tengah, dan kepala mereka ditutup dengan surban putih. Kedatangan mereka sangat kentara sekali bukan lantaran pakaian serba putih yang mereka kenakan, tetapi kedatangan mereka dengan bergerombol.

Dengan dikomandoi oleh pemimpin mereka, mulailah mereka merusak warung-warung yang ada di pinggiran jalan Parung Bogor. Warung remang-remang, begitu warung itu dijuluki oleh orang—karena letak mereka yang dipinggir sawah dan jalan sehingga memancarkan keremangan—dianggap telah dijadikan tempat maksiat—menjual minuman keras dan praktik transaksi seks terselubung. Dalam waktu sekejap warung-warung yang telah ditinggalkan pemiliknya itu hancur dan dibakar. Usaha kelompok FPI menghancurkan tempat-tempat maksiat tersebut mereka maksudkan sebagai bentuk komitmen kelompok ini untuk menegakkan Islam di Indonesia. Kegiatan semacam ini dilakukan oleh FPI utamanya pada bulan Ramadhan setiap tahunnya.

Pada sisi lain, juga terlihat beberapa orang pemuda dengan pakaian khas jubahnya berkeliling di tempat-tempat terbuka seperti alun-alun atau taman-taman yang sering dikunjungi oleh pasangan muda-mudi. Mereka mendatangi pasangan muda-mudi yang lagi pacaran dan memberikan nasihat-nasihat keagamaan pada mereka dan menyuruh mereka pulang apalagi ternyata mereka belum menikah.

Dalam pentas politik nasional, suara kelompok semacam ini juga terlihat vokal. Pada waktu sidang tahunan 2002

beberapa waktu lalu, kelompok ini, dengan didukung oleh pendukung mereka yang militan, melakukan demonstrasi di depan gedung DPR dan MPR menuntut supaya Piagam Jakarta yang memuat "kewajiban pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluknya" untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Mereka berpendapat bahwa sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, sudah sewajarnya jika negara mendengar aspirasi umat Islam untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Walaupun mereka telah mengerahkan massa yang cukup besar untuk memberikan tekanan pada DPR dan MPR, usaha mereka memasukkan Piagam Jakarta kandas.

Di Surakarta kelompok yang menamakan dirinya sebagai FPIS (Front Pembela Islam Surakarta) melakukan *sweeping* terhadap warga negara asing, terutama Amerika Serikat, sebagai reaksi atas keputusan Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan karena dianggap melindungi kelompok Al-Qaeda. Kelompok Al-Qaeda dianggap bertanggung jawab atas pengeboman gedung kembar WTC (World Trade Center). Tindakan Amerika Serikat membombardir pemerintahan Taliban Afghanistan dikecam oleh FPIS sebagai tindakan yang berlebihan. Sebagai reaksi atas tindakan itu, mereka melakukan *sweeping* warga asing di Surakarta.

Gerakan-gerakan itu dimaksudkan untuk menarik dukungan dari kalangan umat Islam Indonesia secara umum. Namun mereka juga menuai akibat dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan tersebut, yaitu mendapatkan berbagai julukan, dari yang simpatik, gerakan yang mengutamakan kekerasan sampai dengan kelompok yang mendukung terorisme.

Jika dilihat dari jumlah pengikut dari kelompok-kelompok tersebut seperti FPI atau FPIS, jumlah mereka relatif kecil. Namun demikian, tingkat militansi mereka yang sangat tinggi dan aktivitas mereka yang gencar, kelompok ini terus mewarnai debat publik tentang wacana keagamaan. Perlu juga dicatat bahwa kelompok ini mempunyai akses terhadap teknologi yang sangat maju. Dilihat dari kemampuan mereka memakai internet maupun teknologi informasi lainnya untuk menyebarluaskan ide-ide mereka menandakan bahwa kelompok tersebut didukung suatu organisasi yang solid. Hal itu dapat terjadi karena kelompok ini didukung oleh anggotanya yang berlatar belakang modern, baik dari pendidikan maupun pekerjaannya.

Menilik dari latar belakang isu yang dikembangkan, gerakan-gerakan kelompok di atas lebih mementingkan gerakan nyata untuk memberantas kemaksiatan yang mereka anggap akan merusak agama. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa tempat-tempat perjudian dan hiburan malam adalah bertentangan dengan agama dan akan menghancurkan akhlak generasi muda Indonesia. Tidak mengherankan jika sikap mereka sangat tegas, bahkan cenderung menggunakan kekerasan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Penggunaan kekerasan dilakukan, dengan dalih bahwa tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak keamanan. Yang lebih parahnya lagi bahkan tidak jarang tempat-tempat itu memanfaatkan *bucking* (perlindungan) dari oknum-oknum keamanan, sehingga akibatnya mereka menempuh jalur itu dengan harapan kegiatan tersebut tidak dapat tumbuh lagi. Namun, secara sosiologis penggunaan kekerasan dapat dikatakan sebagai "taktik" agar suara mereka dapat didengar oleh masyarakat. Studi tentang gerakan massa yang menggunakan kekerasan, ternyata lebih sukses menyampaikan

aspirasinya dibandingkan dengan gerakan massa yang tidak menggunakan kekerasan. Setidaknya keberhasilan ini bersifat sesaat—misalnya langsung mendapat liputan media, menjadi opini publik dan tanggapan langsung dari penguasa.¹⁷

Perkembangan Islam kontemporer Indonesia disemarakkan oleh munculnya gerakan sekelompok umat Islam Indonesia untuk mengambil bentuk gerakan yang lebih bersifat radikal. "Kelompok garis keras" adalah istilah yang sering dinisbatkan kepada kelompok ini. Istilah "garis keras" disandangkan kepada mereka karena sikap mereka yang keras dan fundamentalis terhadap pengamalan agama di dalam masyarakat. Sikap keras ini ditunjukkan dengan sikap mereka yang tidak kompromistik terhadap praktik-praktik yang menyalahi peraturan agama, seperti pelacuran dan warung-warung yang sering dijadikan tempat keberadaan mabuk-mabukan. Tidak mengherankan jika kelompok ini terlihat sering menyatroni dan merusak tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat maksiat.

Sifat keras yang melekat pada kelompok ini berasal dari keinginan mereka untuk menjalankan agama Islam secara mendasar yang tercermin dalam keinginan kelompok ini untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Kasus pelaksanaan hukum rajam kepada seorang yang telah melakukan perzinahan di Ambon beberapa waktu lalu memberikan contoh yang jelas tentang keinginan mereka menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Keinginan untuk menjalankan agama Islam yang menyeluruh juga tampak dari cara berpakaian mereka yang khas, dan cara hidup sosial

mereka—cara makan, bersosialisasi dengan sesama anggota jamaah, dan ketaatan pada pemimpin.

Dalam berbagai literatur yang membahas keagamaan, kelompok ini diberikan label bermacam-macam; ada yang menyebutnya dengan kelompok ekstrimisme, kelompok militan, radikal dan fundamentalis. Tidak mudah memang menulis tentang gerakan Islam semacam itu. Ketidaktahuan itu pertama dikarenakan tidak gampang untuk mendefinisikan "Islam Radikal" itu sendiri. Sebutan radikal yang dilabelkan dalam gerakan Islam seringkali mengandung unsur pejoratif, sehingga tidak mudah untuk memberikan label radikal kepada kelompok tertentu. Terlebih lagi setelah kasus 11 September 2001, kata radikal diidentikkan dengan "terorisme" yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kesulitan lainnya adalah bahwa label radikal selalu dilawankan dengan modernisme. Selanjutnya, definisi yang berkembang dalam kajian gerakan semacam ini seringkali merujuk pada pengalaman yang berkembang dalam tradisi agama Kristen. Tentu saja masing-masing tradisi keagamaan mempunyai pengalamannya tersendiri, sehingga penyamaan tradisi memberikan kesulitan bagi pembahasan gerakan serupa dalam tradisi agama yang berbeda.

Akan tetapi terdapat pengakuan yang umum bahwa terdapat fenomena-fenomena yang dapat ditujukan untuk menyebutkan gerakan keagamaan semacam itu. Walaupun tentu saja harus segera diberi catatan bahwa penyebutan karakteristik gerakan keagamaan semacam itu haruslah diartikan sebagai titik berangkat (*point of departure*) untuk mencari informasi yang lebih mendalam, dan bukan dimaknai sebagai kesimpulan akhir (*final conclusion*). Dengan demikian, terbuka kemungkinan untuk mempertanyakan

¹⁷Doug McAdam, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*, Chicago, The University of Chicago, 1999.

kembali karakteristik-karakteristik yang dipakai sekarang ini. Meminjam keterangan John O. Voll, gerakan keagamaan fundamentalis menunjuk pada "afirmasi terhadap prinsip-prinsip dasar (fundamental) agama dan usaha-usaha untuk membangun kembali masyarakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental tersebut."¹⁸ Dengan demikian gerakan fundamentalis Islam merujuk pada "mengajak umat Muslim kembali ke ajaran Islam" dan "penempatan *ghirah* umat Islam," serta "ajakan untuk bersandar pada prinsip fundamental Islam untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan kontemporer."¹⁹

Barangkali apa yang terlintas dalam benak banyak orang, ketika menyebut gerakan radikal adalah kelompok yang dianggap oleh "Barat" sebagai kelompok teroris yang anti terhadap Barat. Kelompok tersebut secara spesifik ditempatkan pada gerakan Islam yang melawan terhadap kebijakan Barat. Kelompok-kelompok Hizbullah di Palestina misalnya, dianggap oleh Israel sebagai kelompok radikal yang kemudian dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas maraknya kekerasan di wilayah itu. Kelompok dan jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden adalah contoh lain gerakan Islam radikal.

Menurut penelitian tentang fundamentalisme, gejala gerakan semacam itu bukanlah monopoli suatu kelompok keagamaan tertentu dan bukan pula hanya lahir di wilayah tertentu saja. Kelompok gerakan radikal keagamaan juga

¹⁸John O. Voll, "Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan," dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalisms Observed*, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

¹⁹Karm B Akhtar dan Ahmad H. Sakr, *Islamic Fundamentalism*, Cedar Rapids, Iowa: Igram Press, 1982.

terdapat di India dengan latar belakang agama Hindu, dan di Irlandia terdapat gerakan radikal Katolik maupun Protestan yang sangat militan. Bahkan di negara sekular seperti Amerika, gerakan radikal keagamaan juga berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan radikal keagamaan adalah gejala universal dan fenomena yang dapat berkembang pada semua tradisi keagamaan.

Terdapat beberapa term yang muncul ketika berbicara gerakan-gerakan radikal. Istilah semacam *extrinism*, *fundamentalism*, dan *militanism* sering tumpang tindih untuk melakukan gerakan-gerakan radikalisme.

Dalam pandangan teori sosial klasik—sosiologi, psikologi maupun politik—gerakan radikal sosial yang berbau agama maupun tidak dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (*deviance*).²⁰ Hal itu dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan *mainstream* masyarakat. Pandangan yang demikian ini dipengaruhi oleh teori struktural-fungsional (*structural-functionalism*) yang sangat berpengaruh. Teori ini beranggapan pada suatu pemahaman bahwa sebuah sistem masyarakat adalah sebagai suatu kesatuan. Elemen-elemen yang berada dalam sistem tersebut saling mendukung dan saling memperkuat untuk melanggengkan sistem sosial masyarakat. Gerakan radikalisme dipandang dari sudut ini sebagai penyimpangan terhadap keutuhan suatu sistem sosial.

Dalam pandangan teori ini, gerakan radikal muncul sebagai reaksi atas adanya kehancuran struktur (*structural strain*) yang berakibat pada terganggunya psikologis (*disruptive psychological state*). Kelemahan struktur dalam masya-

²⁰Doug McAdam, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*, Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

rakat berakibat pada terganggunya keadaan psikologis manusia. Ketika gangguan psikologis itu mencapai puncaknya lahirlah gerakan massa. Teori ini merupakan teori klasik gerakan massa (*classical theory*).

Teori klasik tentang gerakan radikal ini memang masih berpengaruh sampai sekarang. Namun sudah banyak teori sosial yang berupaya menjelaskan gejala radikalisme ini secara wajar. Misalnya dalam pandangan teori politik modern, gerakan radikal tidak lagi dipandang sebagai suatu gerakan menyimpang, tetapi dianggap sebagai gerakan yang wajar yang mempunyai tujuan politis. Sebagaimana kelompok politik lain yang memanfaatkan sosial kapital yang dapat dipakai dalam menarik massa, maka sesungguhnya gerakan radikal adalah upaya untuk memanfaatkan *social capital*nya (agama, sosial maupun ekonomi) untuk kepentingan politik. Dengan kata lain, gerakan radikal adalah gerakan politik sama seperti kelompok politik lainnya.

Namun demikian, ada beberapa kenyataan menarik dari penemuan para antropolog tentang gerakan radikal. *Pertama*, gerakan radikal keagamaan seringkali dibarengi oleh gerakan "Ratu Adil," (*millenarian movement*). Gerakan ini seringkali diilhami oleh faktor budaya dan agama yang terdesak oleh kekuatan lain—kolonialisme maupun introduksi dari budaya asing. *Kedua*, gerakan radikal memakai simbol-simbol perlawanan dengan memakai budaya maupun ritus keagamaan yang khas yang sangat berbeda dengan *mainstream* masyarakat. Pada gejala yang kedua ini terlihat misalnya, dengan cara berpakaian yang khas maupun ritual keagamaan mereka yang khas pula. Dengan demikian, gerakan radikal dalam pandangan antropologi dipandang sebagai kebangkitan (*revivalism*) untuk membangkitkan kembali dari keterpurukan budaya. Pada sisi yang lain, gerakan

radikal merupakan perlawanan (*struggle*) sekaligus penolakan (*rejection*) terhadap budaya ataupun kekuatan asing.

Berpijak pada landasan di atas, bagaimana gerakan radikal Islam di Indonesia dapat dijelaskan; apakah gerakan radikalisme agama di Indonesia sebagai suatu gejala wajar pada alam demokrasi yang menuntut partisipasi dan keterbukaan? Ataukah gerakan radikalisme agama di Indonesia sebagai suatu "gerakan politik" yang bertujuan untuk meraup keuntungan politik (kekuasaan) dan ekonomi? Ataukah gerakan radikalisme di Indonesia merupakan gerakan budaya (*cultural movement*) yang merupakan penolakan dan perlawanan terhadap modernitas? Atau gerakan radikal hanyalah ciptaan rezim (*puppet movement*) yang digunakan untuk mendiskreditkan kelompok tertentu?

Radikalisme sebagai Gerakan Politik

Dalam peta politik yang berubah dengan cepat—kekuasaan otoriter tumbang dan tidak ada kepastian politik—banyak orang yang berharap untuk dapat masuk dalam kekuasaan. Hal itu terlihat dari beramai-ramainya orang mendirikan partai politik sebagai kendaraan untuk masuk dalam kekuasaan. Pada pemilu 1999 terdapat lebih dari 150 partai yang mendaftarkan diri, tetapi hanya 48 yang layak ikut dalam pemilu. Ideologi maupun program yang diusung oleh partai-partai tersebut juga sangat beragam; dari isu agama hingga isu kemiskinan dan isu rakyat kecil—*wong cilik*.

Gejala euphoria politik yang demikian tersebut bukanlah gejala unik Indonesia. Hal serupa juga terjadi, misalnya, di Polandia, Mali dan negara lainnya yang mengalami *political breakdown* seperti Indonesia. Di Indonesia yang masyarakat

dan budayanya sangat pluralistik, situasi *chaos* politik tersebut memberikan peluang bagi hadirnya sistem-sistem politik lokal—entah itu diinspirasi oleh budaya atau agama—ke pentas politik nasional. Maka tidak mengherankan jika tawaran-tawaran sistem alternatif begitu kentara pada masa pemilu 1999 tersebut.

Adalah sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tidak mengherankan jika Islam menjadi faktor penting dalam kancah sosial politik Indonesia. Menurut survey PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama merupakan bimbingan yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Sembilan puluh dua persen (92%) umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama telah membimbing kehidupan manusia. Terlebih lagi umat Islam Indonesia menyatakan bahwa mereka selalu mempertimbangkan agama (70%) setiap kali hendak mengambil keputusan dalam masalah sosial dan politik. Dengan posisi keterikatan umat Islam Indonesia dengan agamanya yang begitu kuat itu, maka wajar jika agama dijadikan daya tarik bagi partai politik. Dengan kata lain, agama di Indonesia adalah kapital sosial (*social capital*) yang sangat kuat dan besar yang diperebutkan dalam meraih dukungan politik.

Fenomena kelompok garis keras yang mengusung isu-isu agama—pelaksanaan syariat Islam, pemberantasan maksiat dan semacamnya—dapat diartikan sebagai strategi politik untuk meraih dukungan massa. Pilihan memanfaatkan isu politik agama adalah pilihan rasional (*rational choice*) dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia. Jadi, tidak seperti teori konvensional tentang gerakan massa yang melihat gerakan radikal sebagai kelompok sosial yang menyimpang (*social deviance*), pada dasarnya kelompok radikal adalah

kelompok kepentingan politik yang sedang melakukan tawar-menawar politik dengan menggunakan isu-isu agama.²¹

Dilihat dari gerakan *civil society* yang sedang berkembang, maka gerakan radikal agama adalah bagian dari kelompok-kelompok sosial yang sedang mengisi ruang publik (*public sphere*) dengan menyuarakan isu-isu agama.²² Dengan demikian, suara-suara keras mereka—yang mungkin terasa keras bagi kelompok lain—sesungguhnya bagian dari proses negosiasi sosial dalam merumuskan tatanan sosial yang baru.

Di samping itu, posisi partai politik Islam semasa pemerintahan Orde Baru tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan secara bebas aspirasi mereka. Walaupun disediakan sebuah partai untuk menampung aspirasi politik Islam, tetapi mereka tidak dapat menyuarakannya sesuai dengan aspirasi mereka. Kontrol pemerintah sangat kuat bagi partai-partai politik saat itu. Pada saat kontrol dan kekang politik pemerintah lepas, mudah dipahami jika beberapa kelompok Islam membentuk kelompok yang menyuarakan aspirasi mereka.²³

Dalam skema teoretik ini, maka mati dan berkembangnya gerakan radikal tergantung pada dua hal. *Pertama*, sejauhmana isu-isu keagamaan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat. *Kedua*, sebagai kelanjutan dari isu yang pertama, kelompok radikal akan sangat tergantung

²¹*Ibid.*, hlm. 6-10.

²²Noorhaidi Hasan, "In Search of Identity: The Contemporary Islamic Communities in Southeast Asia," *Studia Islamika*, Volume 7, Number 3, Jakarta: 2000, hlm. 67-75.

²³Jamhari, "Islamic Parties: Threat or Prospect?," Geoff Forrester, *Indonesia Post Soeharto*, Indonesian Project RSPAS ANU, 1998.

dari dukungan masyarakat. Seandainya masyarakat tidak membeli, karena tidak tertarik dengan isu-isu keagamaan, cepat atau lambat gerakan itu akan gulung tikar.

Radikalisme sebagai Gerakan Budaya

Seorang aktivis KPPSI (Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam) di Makassar mengatakan, "... Kitasudah merasa puas sekarang ini bahwa wacana syariat Islam telah menjadi pembicaraan secara terbuka, baik yang setuju maupun yang keberatan." Bagi kelompok KPPSI perjuangan mereka untuk menerapkan syariat Islam di Makassar sesungguhnya dilandasi beberapa alasan. *Pertama*, kekecewaan mereka terhadap pemerintah sekarang ini yang tak kunjung selesai mengatasi krisis bangsa Indonesia. Ketika harapan krisis berakhir tak kunjung tiba, maka kemudian mereka teringat kembali kepada pahlawan sejarah (*historical hero*) yang dianggap pernah menyahterakan mereka.

Boleh saja pemerintah menganggap Kahar Muzakar sebagai pemberontak. Namun bagi kelompok tertentu masyarakat Makassar, Kahar Muzakar merupakan seorang pahlawan. Karena jasa Kaharlah syariat Islam pernah diterapkan di Makassar, terutama wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kahar Muzakar. Walaupun secara agama Kahar Muzakar bukanlah seorang ulama, tetapi kepemimpinannya memberikan gambaran sebagai sosok yang mulia. Dibantu oleh beberapa ulama Islam seperti K.H. Munawar Kholil, K.H. Ambo Dale dan lain-lainnya, Kahar dan komunitasnya mengaplikasikan syariat di dalam masyarakat. Itulah masa kejayaan, di mana tindak kriminal sangat kecil, dan rakyat merasa aman dan sejahtera di bawah kepemimpinan Kahar.

Mengapa Kahar Muzakar? Alasan yang paling sederhana ialah karena Kahar adalah orang Makassar yang berhasil menerapkan syariat Islam. Dalam memori orang Makassar, saat Kahar Muzakar menguasai Makassar, kehidupan mereka sangat aman dan makmur.

Kedua, sebetulnya faktor kedua ini juga merupakan kekecewaan masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi atas lengsernya Habibie. Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi, Habibie adalah simbol dari kemajuan dan rasa kepercayaan diri masyarakat. Oleh karena itu, ketika Habibie akan akan dipecundangi di tengah jalan, tak mengherankan jika masyarakat Sulawesi kecewa.

Ketiga, keinginan untuk menerapkan syariat Islam di beberapa daerah ikut mendompleng isu otonomi daerah. Kasus Aceh yang diperbolehkan untuk menerapkan syariat Islam sebagai salah satu wujud otonomi khusus Aceh, membuat daerah lain mengikuti jejaknya. Makassar misalnya, dengan tegas mengatakan kalau Aceh diberikan keleluasaan untuk menerapkan syariat Islam, Makassar juga akan menuntut hal yang sama. KPPSI, organisasi koalisi berbagai organisasi Islam di Makassar, yang memperjuangkan syariat Islam di Makassar, meniru Aceh; memperjuangkan penerapan syariat Islam melalui pintu otonomi daerah.

Berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh FPI atau kelompok lain yang menyuarakan aspirasi penerapan syariat secara nasional, KPPSI di Makassar berjuang melalui parlemen di daerah. Karena itu, desakan KPPSI cukup berhasil dan mendapat dukungan yang sangat signifikan baik dari lembaga legislatif maupun dukungan massa.

Hubungan yang erat antara perjuangan otonomi daerah dan syariat Islam mengindikasikan adanya aspek perjuangan

identitas budaya yang melekat di situ. Bagi masyarakat Makassar, penerapan syariat Islam justru akan dapat mempererat perbedaan-perbedaan suku-suku yang ada, misalnya suku Bugis, Makassar, Mandar dan lain-lainnya. Islam telah terbukti menjadi pengikat persatuan di antara suku-suku itu.

Gerakan Keagamaan

Secara teologis, gerakan Islam garis keras dipengaruhi oleh teologi salafi. Jika ditelusuri akar genealogis teologi salafi sebenarnya teologi ini bersumber pada beberapa pemikiran dan gerakan. Gerakan Islam garis keras di Indonesia mengklaim dirinya sebagai pengikut *minhaj al-Salafi* (jalannya orang-orang terdahulu). Teologi salaf dipengaruhi oleh, pertama, pemikiran Ibn Taimiyah yang menentang adanya infiltrasi budaya-budaya lokal dalam mempraktikkan agama. Kedua, secara gerakan, teologi salaf dipengaruhi oleh gerakan kaum reformis Wahabi di Arab Saudi. Gerakan Wahabi di Arab Saudi mengharuskan adanya pemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya maupun ajaran non-Islam dalam praktik-praktik keislaman. Misalnya adalah pemugaran makam, termasuk makam Rasul, dinilai oleh kelompok Wahabi sebagai pengaruh dari budaya non-Islam. Penggunaan teknologi, pada awal munculnya Wahabi juga ditentang oleh mereka.

Di Indonesia, gerakan Wahabi juga memengaruhi gerakan-gerakan pembaruan Islam, seperti halnya organisasi semacam Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam) yang menjadikan pemurnian praktik agama Islam sebagai program utama mereka. Misalnya di kalangan Muhammadiyah dikenal doktrin mengikis penyakit TBC (Tahayul, Bid'ah dan Churafat) dalam praktik keislaman di Indonesia.

Agaknya teologi salaf dilanjutkan oleh kelompok garis keras Islam kontemporer. FKAWJ misalnya, menjadikan buku-buku Ibn Taimiyah sebagai buku pokok yang dipelajari di pondok pesantren mereka. Bahkan, cara berpakaian mereka yang khas—memakai jubah, ikat kepala dan memanjangkan jenggot—merupakan wujud dari pemihakan kepada pendahulu mereka yang shalih (*salaf al-salih*).

Ketiga, dan ini yang paling mendasar, gerakan garis keras ini dipengaruhi oleh penafsiran yang literal (*mazhab al-dhahiri*), yang lebih melihat teks tanpa melihat konteksnya. Hal itu terlihat dari cara mereka memahami teks-teks suci ajaran Islam tanpa mempertimbangkan konteks dan interpretasinya. Misalnya dalam memahami penerapan syariat, karena jelas tertulis dalam Alquran bahwa orang mencuri harus dipotong tangannya, mereka menerjemahkan bahwa memperjuangkan hukum dalam negara sebagai bagian dari kewajiban seorang Muslim.

Pemahaman yang literal atau sering juga disebut pemahaman yang skripturalis mengimbas pada pemahaman mereka terhadap sejarah dan peradaban. Masa keemasan Islam (*the golden age*) yang pernah terwujud pada zaman nabi dijadikan sebagai proto-model bagi pembentukan negara. Dalam memperjuangkan negara, mereka merujuk zaman nabi tersebut dan ingin menerapkan apa adanya.

Mengapa pemahaman yang skripturalis ini marak kembali? Secara sosiologis dan antropologis, kecenderungan orang untuk kembali ke agama meningkat ketika orang berada dalam keadaan krisis.²⁴ Jadi untuk kasus Indonesia,

²⁴Roy A. Rappaport, *Ritual and Religion in the Making of Humanity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Wuthnow, *Meaning and Moral Order*, California: The University of California Press, 1987.

ketika krisis ekonomi, politik dan sosial terjadi setelah pergantian rezim, terjadi banyak Muslim yang kembali ke agama. Namun mengapa skripturalis? Karena pendekatan ini sangat mudah untuk diikuti, terutama bagi mereka yang baru mengenal agama (*new convert*) atau mereka yang menemukan kembali agama (*born-again Muslim*). Kemudian pendekatan ini juga populer di kalangan anak muda yang ingin mendapatkan kepastian untuk dasar keyakinan mereka memperoleh baiki keadaan. Bagi kelompok orang miskin dan yang tidak beruntung (*unfortunate people*), krisis ekonomi dan sosial politik telah mengandaskan harapan mereka. Ketika keputusan munculan, agama adalah penyelamat yang tertinggi.

Corak Islam Indonesia Mendatang?

Beberapa waktu silam, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa Islam Asia Tenggara, khususnya Islam di Indonesia dan Malaysia, akan menjadi *new picture* dari Islam. Selama ini, Islam seringkali digambarkan dengan kekerasan dan bahkan teroris. Gambaran itu muncul akibat konflik dan kekerasan yang terus menerus terjadi di Timur Tengah. Di tengah-tengah potret yang demikian itu, Islam Asia Tenggara muncul dengan wajahnya yang lain. Islam di Indonesia dan Malaysia tumbuh sebagai Islam yang toleran yang dapat berkembang baik dalam masyarakat yang majemuk. Potret Islam di Indonesia juga tercermin dari suksesnya Muslim Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, seperti isu gender dan demokrasi.

Kedudukan perempuan di Indonesia, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan politik sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada wilayah Muslim lainnya. Masjid-masjid yang di wilayah lain sepi dengan perempuan, justru

di Indonesia jumlah perempuan yang datang ke masjid untuk shalat maupun untuk mendengarkan pengajian jauh lebih banyak. Dalam kehidupan sosial politik, perempuan Indonesia mempunyai pengalaman yang lebih baik. Walaupun ada sebagian ulama protes jika perempuan menjadi presiden. Nyatanya tanpa ada gangguan yang berarti Megawati dapat menjadi presiden Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam.

Dalam persoalan demokrasi, apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan potret yang berbeda. Setelah kejatuhan rezim militeristik dan otoriter Orde Baru, banyak tuntutan untuk menerapkan demokrasi di Indonesia. Walaupun tersendat-sendat, nyatanya proses demokratisasi di Indonesia terus berjalan. Tesis yang selama ini ada bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, agaknya tidak berlaku untuk Indonesia. Dalam survei PPIM 2001 ditemukan bahwa 70% umat Islam Indonesia *committed* untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Namun potret-potret ramah, plural, toleran Islam Asia Tenggara seakan-akan terkubur oleh gerakan-gerakan garis keras Islam. Sampai-sampai karena gerakan-gerakan itu, Indonesia dicap sebagai *the nest of terrorism* (sarang teroris). Potret moderat Islam Indonesia terkubur. Apakah gejala radikalisme Islam di Indonesia merupakan gejala umum, ataukah gejala riak-riak kecil umat Islam Indonesia? Melihat jumlah pengikut gerakan radikal Islam di Indonesia, mereka adalah kelompok kecil. Tentu saja harus diberikan catatan walaupun kecil mereka adalah militan yang mampu dan mau berbuat yang berbeda dengan *mainstream*. Kasus pengeboman di Legian Bali menunjukkan hal itu.

Gerakan Islam garis keras ini juga akan mempunyai pengaruh dalam peta perpolitikan Indonesia. Adanya

beberapa partai politik Islam yang sehaluan dengan gerakan Islam garis keras tentu akan membawa nuansa tersendiri. Misalnya isu-isu tentang syariat Islam akan terus menjadi dagangan dan perdebatan wacana di kalangan umat Islam Indonesia. Perilaku yang khas dari gerakan Islam garis keras—misalnya dalam berpakaian, berorganisasi dan bergaul—tetap akan masih ada.

Namun demikian, sepanjang dua organisasi besar Islam Indonesia tak terusik, yaitu NU dan Muhammadiyah, gerakan-gerakan Islam garis keras akan dapat dibendung. Dengan kekuatan massa maupun kulturalnya—NU dengan jaringan ulama dan pesantrennya serta Muhammadiyah dengan pendidikan dan amal bakti sosialnya—dua organisasi itu tetap akan memainkan peranan penting dalam mewarnai dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia.